

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengguna laporan keuangan mengharapkan informasi akuntansi yang berkualitas dan dapat mengimplementasikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya, salah satu informasi yang paling penting adalah informasi laba.

**Dechow (1994) menyatakan bahwa laba merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh pengguna dalam lingkup yang luas sebagai ringkasan pengukuran kinerja perusahaan seperti program kompensasi, perjanjian utang, perusahaan yang *go public*, investor dan kreditor. Investor cenderung lebih memperhatikan laba sebagai cerminan kinerja perusahaan.<sup>1</sup>**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia standar keuangan tentang dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif informasi keuangan ada empat yaitu (1) Informasi keuangan yang relevan, di mana informasi keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. (2) Informasi keuangan yang dapat diandalkan, di mana informasi keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. (3) Informasi keuangan yang dapat dipahami, di mana informasi yang ditampung dalam laporan keuangan dengan mudah dapat segera dipahami oleh penggunaannya. (4) Informasi keuangan yang dapat dibandingkan, di mana pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk

---

<sup>1</sup>Fitri Ella Fauziah dan Ichwan marissan, “Pengaruh Corporate Social Reslonsibility (Csr) Terhadap Kualitas Laba Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating”, Jurnal Akuntansi & Bisnis Fakultas Ekonomi Universita Islam Nahdlatul Ulama’Jepara, Vol. 11, Nomor 1, 2014, hal.39.

mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. **“Kualitas laba merupakan indikator dari kualitas informasi keuangan. Kualitas informasi keuangan yang tinggi berasal dari tingginya kualitas pelapor-an keuangan.”**<sup>2</sup>Kualitas laba yang tinggi memenuhi keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan. Manajer dapat memilih kebijakan akuntansi dari seperangkat kebijakan akuntansi yang ada misalnya GAAP untuk mencapai tujuannya.

Ketika perusahaan melakukan praktik manajemen laba untuk mendapatkan laba yang tinggi akan merusak informasi yang ada pada laporan keuangan. Gambaran laba tidak lagi dapat mewakili kinerja perusahaan secara fair, sehingga akan mengurangi realibilitas dari laba itu sendiri. Dengan demikian informasi laba menjadi kurang relevan, sehingga bisa disimpulkan bahwa pihak manajemen telah dengan sengaja melakukan tindakan manipulasi atau tindakan lainnya yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Masalah praktek manajemen laba terjadi ketika pihak manajemen mempunyai keyakinan kuat bahwa pihak investor tidak mempunyai akses informasi ke dalam perusahaan, sehingga investor akan melihat laporan keuangan tersebut sebagai laporan yang true report. Tindakan manajemen laba dapat mengakibatkan kualitas laba rendah karena laba yang dilaporkan tidak dapat digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dengan demikian kualitas laba di penelitian ini ditunjukkan dengan ada tidaknya manajemen laba. Perusahaan yang mampu menghasilkan kualitas laba yang tinggi maka manajemen laba semakin rendah, begitu juga sebaliknya.

Survey global yang dilakukan oleh *The Econo-mist Intelligence Unit* menunjukkan bahwa 85% para eksekutif senior dari berbagai organisasi menjadikan Tanggung Jawab Sosial

---

<sup>2</sup>Surifah, **“KUALITAS LABA DAN PENGUKURANNYA”**, Jurnal Ekonomi Manajemen & Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol.8, Nomor 2, 2010, Hal.33.

korporat (*Corporate Social Responsibility*) dan Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sebagai pertimbangan utama yang dapat menghasilkan kualitas laba yang baik.

Dalam penelitian Fitri Ella (2013) menyatakan bahwa:

**Salah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan pandangan (*image*) yang positif terhadap perusahaan *stakeholder* yaitu dengan implementasi CSR.<sup>3</sup>**

Tanggung jawab social korporat dapat menurunkan kemungkinan adanya tekanan dari *stakeholders* yang tidak puas atau yang kepercayaannya menurun karena manajemen laba. Efek jangka panjang implementasi tanggung jawab sosial korporat (CSR), perusahaan dapat memiliki hubungan yang baik dengan *stakeholders*. **“Di Indonesia, pelaksanaan aktivitas CSR telah mendapat tanggapan positif dari pemerintah dengan munculnya peraturan Undang-Undang No.40 tahun 2007.”<sup>4</sup>** Peraturan tersebut menetapkan kewajiban bagi semua perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial korporat dan melaporkannya di dalam *annual report*. Pada tahun 2012 pemerintah semakin memperkuat peraturan dalam melaksanakan peran CSR dengan mengeluarkan peraturan Undang-Undang No.47 tahun 2012. Peraturan ini menetapkan bahwa CSR dilaksanakan berdasarkan kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

Selain itu tata kelola perusahaan juga berpengaruh terhadap tingkat kualitas laba dan menaikkan kepercayaan *stakeholder*. Menurut Diptarina Yasmeeen dan Sri Hermawati (2015) menyatakan bahwa:

***Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah**

---

<sup>3</sup>Fitri Ella Fauziah dan Ichwan Marissan, *Op.Cit.*, 2014, hal.40.

<sup>4</sup>Silviana Isyanto Dan Dewi Ratnaningsih, **“Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kualitas Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2012)”**, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, Hal. 2.

**kinerja perusahaan. Pelaksanaan *coporate governace* yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan dan nilai pasar perusahaan.<sup>5</sup>**

Tata kelola perusahaan juga merupakan faktor non keuangan lainnya yang saai ini banyak dipertimbangkan juga di kalangan investor dalam menilai kualitas perusahaan.

Dalam mekanisme GCG, masalah antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan GCG. Pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan akan timbul suatu masalah *agency*. Yaitu terjadi konflik kepemilikan antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan *agent* (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat). Sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Melalui keputusanketua Bapepam dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012, Bapepam mensyaratkan bahwa struktur komite audit paling kurang terdiri dari tiga anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik, dan wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Kualitas laba dapat diukur dengan *Discretionary Accrual* dan *Real Activity Manipulation*. Pada penelitian ini manajemen laba diukur dengan *Discretionary Accrual* agar dapat menghasilkan kualitas pelaporan laba yang bersifat netral dan dapat menjadi sumber dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

Ada beberapa penelitian sebelumnya tentang CSR, GCG dan kualitas laba. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ella Fauziah (2014) yang berjudul *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kualitas Laba Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel*

---

<sup>5</sup>Diptarina Yasmeeen dan Sri Hermawati, “**Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur**”, Jurnal Ekonomi Bisnis Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, Vol.20, Nomor 1, 2015, hal.26.

*Moderating*”. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2010-2012. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara perusahaan yang melakukan kegiatan CSR terhadap manajemen laba yang merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur kualitas laba. Penelitian lain yang dilakukan oleh Silvia Isyanto dan Dewi Ratnanin (2013) berjudul “*Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kualitas Laba*” terhadap seluruh perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara perusahaan yang melakukan kegiatan CSR terhadap manajemen laba.

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini karena adanya ketidak konsistenan yang terdapat pada penelitian terdahulu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti ulang tentang CSR dan GCG di Indonesia karena peneliti ingin mengetahui apakah praktik CSR dan GCG di perusahaan Indonesia cenderung membatasi adanya manajemen laba sehingga meningkatkan kualitas laba atau sebaliknya. Sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT DAN TATA KELOLA KERUSAHAAN TERHADAP KUALITAS LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI tahun 2015-2017)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah tata kelola perusahaan (GCG) berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan yang terdaftar di BEI?

### **1.3 Batasan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada pengaruh *Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance* dari sisi komite audit terhadap kualitas laba perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pendahuluan dan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap kinerja laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, analisis data dan pembahasan serta kesimpulan dan saran.

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **Bab II Landasan Teori**

Pada bab landasan teori akan diuraikan mengenai teori yang menunjang penulisan penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya.

### Bab III Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian akan dijelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengukuran variabel.

### Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab hasil dan pembahasan akan dijelaskan hasil-hasil setiap pengujian dan pembahasannya.

### Bab V Kesimpulan dan Saran

Pada bab kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan tentang hasil dari pengujian hipotesis dan juga saran dari penulis.

### Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landsan Teori**

Terdapat teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu *legitimacy theory* dan *agency theory*. *Legitimacy theory* merupakan teori yang paling tepat untuk mendasari penelitian dibidang tanggung jawab sosial perusahaan yang menjelaskan alasan pengungkapan suatu informasi oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Sementara itu *agency theory* adalah teori yang mendasari penelitian mengenai *good corporate governance*.

##### **2.1.1 Teori Legitimasi**

*Legitimacy theory* yaitu perusahaan yang memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan perusahaan berusaha menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk mendapatkan legitimasi dari kelompok tersebut. Teori tersebut dibutuhkan oleh intitusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.

Perusahaan menggunakan laporan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan diterlegitimasi. Perusahaan melalui top manajemennya mencoba memperoleh



kesesuaian antara tindakan organisasi dan nilai-nilai dalam masyarakat umum dan politik yang relevan atau *stakeholder*-nya.

### 2.1.2 Teori Agensi

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan.

**Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik (perusahaan saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut *agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.<sup>6</sup>**

Penggolongan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku

**Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan (*agency theory*) dapat menjelaskan kesenjangan antara manajemen sebagai *agent* dan para pemegang saham sebagai *principal* atau pendelegator. Dalam hal ini, *principal* yang mendelegasi pekerjaan kepada pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan tugas pekerjaan.<sup>7</sup>**

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate governance dan earning manajemen. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang simetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetris tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, “**Good Corporate Governance**”, Cetakan Pertama: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.13

<sup>7</sup> Harmono, “**Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorerd Pendekatan Teori, kasus, dan Riset Bisnis**”, Cetakan keenam: Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal.3.

para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

**Masalah keagenan (*agency problem*) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Mecking (1976) menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “*agen*” dan pemegang saham “*principal*”.<sup>8</sup>**

Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal.

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan keenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek dari pada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Manajemen laba didasari oleh adanya teori agensi yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal.

## 2.2 Kualitas Laba

---

<sup>8</sup> Retno Budhi Wiyarsi, “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI) Tahun 2008-2010”, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hal. 8 & 9.

Kualitas laba merupakan sesuatu yang sentral dan penting dalam dunia akuntansi karena berdasar kualitas laba tersebut profesi akuntansi dipengaruhi. Investor, kreditor dan para pemangku kepentingan lainnya mengambil keputusan salah satunya berdasarkan pada laporan keuangan, apabila kualitas laba yang disajikan tidak dapat diandalkan maka para pemangku kepentingan tidak dapat percaya lagi pada profesi akuntansi. Para akuntan mengaudit dengan baik, untuk menyakinkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar sehingga laba yang disajikan berkualitas.

***Bellovary et al. (2005)* dalam mendefinisikan kualitas laba sebagai kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba perusahaan dan membantu memprediksi laba mendatang, dengan mempertimbangkan stabilitas dan persistensi laba.<sup>9</sup>**

***Velury (1999)* menggunakan ukuran kualitas laba sesuai dengan yang terdapat dalam karakteristik kualitatif informasi keuangan yaitu: 1) Nilai prediksi, ukuran dengan persistensi laba, 2) Nilai umpan balik, yang diukur dengan *price earnings ratio*, 3) Tepat waktu, yang diukur dengan tanggal laporan, 4) Netral, diukur dengan besarnya *discretionary accruals*, 5) kejujuran penyajian diukur dengan rasio arus kas/ laba, 6) keterujian, diukur dengan pendapat auditor.<sup>10</sup>**

Menurut standar akuntansi keuangan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa informasi laporan keuangan harus mencerminkan keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan agar berguna bagi pemakai. Penyebab informasi laporan keuangan menyimpang dari keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah adanya manajemen laba. Manajemen laba merupakan rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan demikian kualitas laba suatu perusahaan dapat ditunjukkan dengan manajemen laba. Semakin rendah manajemen laba maka semakin tinggi kualitas laba dan begitu juga sebaliknya.

---

<sup>9</sup>Surifah, **Op.Cit.**, hal.33.

<sup>10</sup>**Ibid**, 2010, hal.37

Alat untuk mengukur apakah laporan suatu laporan keuangan netral atau tidak, digunakan *discretionary accruals*. *Discretionary accruals* biasanya digunakan untuk menilai apakah manajer melakukan manajemen laba atau tidak. Ada berbagai pendekatan untuk menentukan tingkat kualitas laba. Dechow *etal.* (2009) dalam Surifah (2010) mengelompokkan ukuran kualitas laba ke dalam aspek yaitu, kualitas akrual, pesistensi laba dan pediktabilitas. Dan juga *Statistical properties of earning*, *Investor responsiveness to earning*, dan *external indicators of financial reporting quality*. *Statistical properties of earnings* meliputi persistensi dan *accruals*, *earnings smoothness*, *asymmetric timeliness* dan *timely loss recognition*, serta *brenchmarking*. *Investor responsiveness* meliputi penggunaan *earning response coefficient (ERC)* sebagai ukuran kualitas laba, sedangkan *external indicators* melihat kualitas laba dari dimensi standar akuntansi dan *auditing*, *restatement*, dan prosedur pengendalian internal perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan ukuran kualitas laba dengan menggunakan kategori yang pertama dari pengkelompokan ukuran kualitas laba oleh Dechow *et. al.* (2009). **Ukuran kualitas laba yang digunakan adalah *discretionary accruals*. Kerena *discretionary accruals* merupakan model *accruals* yang paling sering digunakan dalam menilai kualitas laba akuntansi.**

### **2.3 Tanggungjawab Sosial Korporat (Corporate Social Responsibility)**

Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) atau lebih dikenal dengan sebutan CSR, menjadi sebuah topik diskusi yang lebih menarik perhatian dunia bisnis di Eropa dan Amerika Serikat sejak lebih kurang satu abad yang lalu. “... mengenai CSR selalu mengarah pada suatu kondisi dilematis antara stakeholder’s value yang dihasilkan

**perusahaan dan upaya memaksimalkan kepentingan publik.”<sup>11</sup>** Dengan kata lain, keterlibatan perusahaan dalam sebuah tanggungjawab social selalu meningkatkan konflik tentang fungsi direksi yang harus mengabdipada kepentingan yang terbaik bagi perusahaan atau menjadikan perusahaan sebagai warga negara yang baik (*good corporate citizen*).

Beberapa definisi dari Corporate Sosial Responsibility sebagai berikut:

- a. **Melakukan tindakan sosial termasuk kedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan undang-undang (Chambers dalam Iriantara, 2004:49)**
- b. **Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunikasi lokal, dan masyarakat yang lebih luas (*Trinidadals & Tobacco Bureau of Standars*)**
- c. **Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (local) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (*The World Business Council for Suistanable Development*)<sup>12</sup>**

Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai berikut:

**Lembaga keuangan global ini merumuskan CSR sebagai “the commitment of business to contribute to substainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.”<sup>13</sup>**

Meski memiliki banyak definisi, namun secara esensi CSR merupakan wujud dari giving back dari korporat kepada komunitas. Perihal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan dan menghasilkan bisnis berdasarkan pada niat tulus guna memberi kintribusi yang paling positif pada komunitas (stakeholder).

---

<sup>11</sup>Martono agusti, “**TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**”, Cetakan Pertama: Books Terrace & Library, Bandung, 2010, Hal.2

<sup>12</sup>Reza Rahman, “**Corporate Social responsibility: Antara Teori dan Kenyataan**”, Cetakan Pertama, Medpress, Yogyakarta, 2009, Hal. 10

<sup>13</sup> Busyra Azheri, “**Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory**”, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal.20

Dengan demikian, operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomunikasi dengan ukuran keuntungan secara financial saja, tetapi juga pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam sebuah artikel yang berjudul “How Should Civil Society (and The Government) Respond to ‘Corporate Social Responsibility’?”, Hamann dan Acutt (2003) membahas tentang motivasi yang mendasari kalangan bisnis menerima konsep CSR.

**Ada dua macam motivasi utama sebagai berikut:**

1. Akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superficial, dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi citra sebagai korporasi yang tanggap terhadap kepentingan sosial.
2. Legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk memengaruhi wacana. Pertanyaan-pertanyaan absah apakah yang dapat diajukan terhadap perilaku korporasi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi ini berargumentasi wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan lebih khusus para korporasi raksasa.

Di Indonesia, CSR secara gencar dikampanyekan oleh *Indonesia Business Link* (IBL).

Disini terdapat lima pilar aktivitas CSR, yaitu:

- 1) *Building human capital*  
**Berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan SDM yang andal, di sisi lain, perusahaan juga diuntut melakukan pemberdayaan masyarakat.**
- 2) *Strengthening economies*  
**Perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya, agar pemerataan kesejahteraan.**
- 3) *Assesing social good governance*  
**Upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar, agar tidak menimbulkan konflik.**
- 4) *Encouraging good governance*  
**Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada Good Corporate Governance (GCG)**

5) *Protecting the environment*

Mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. (Wahyidi & Azheri, 2008:37)<sup>14</sup>

Pengungkapan CSR kepada publik digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan dasar tertentu atau politik kebijakan tanggung jawab lingkungan dan sosial sebagai komitmen dasar perusahaan terhadap CSR. Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR umumnya bersifat voluntary (sukarela), unaudited (belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu). “Guthrie dalam Distha (2011) menyebutkan tema-tema yang termasuk dalam wacana akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah:”<sup>15</sup>

1. *Community* (Kemasyarakatan)

Program CSR community (pengembangan masyarakat di Indonesia) dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

a. *Community Relation*

*Community Relation* yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengembangan kesalahpahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait.

b. *Community Services*

*Community Services* merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kegiatan ini adalah memberi kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan hanyalah sebagai fasilitator masalah tersebut.

c. *Community Empowering*

---

<sup>14</sup> Reza Rahman, *Op.Cit.*, hal. 13.

<sup>15</sup> Kania Amanda Distha, “Pengaruh Praktek Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2011, hal.23.

*Community Empowering* adalah program-program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menjunjung kemandiriannya, seperti pembentukan industri kecil lainnya secara alamiah anggota masyarakat sudah mempunyai pranata pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranate sosial yang ada tersebut agar dapat berlanjut.

## 2. *Employment* (ketenagakerjaan)

*Employment* menurut perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial terhadap pegawai yang merupakan aset yang sangat berharga ini diwujudkan antara lain dengan memperlakukan mereka dengan aktifitas yang terdiri dari 14 item yaitu; Jumlah tenaga kerja, keselamatan kerja (kebijakan dan fasilitas keselamatan kerja), kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan), koperasi karyawan, gaji/upah, tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa kritis, kesejahteraan untuk karyawan, asuransi dan fasilitas transportasi, pendidikan dan pelatihan, kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan kerir, fasilitas peribadahan, cuti karyawan, pension, serikat pekerja, kesempatan kerja bersama dan *turn over* pekerja.

## 3. *Product and consumer* (Produk dan Konsumen)

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan konsumen, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan.

**Menurut Guthrie dalam Utomo (2000), lingkup CSR perusahaan tidak hanya berkuat pada pengembangan masyarakat dan juga lingkungan saja, namun juga harus masuk ke dalam ranah output, berupa produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang nantinya akan berdampak pada konsumen yang akan emakai produk tersebut (*customer satifcation*).<sup>16</sup>**

---

<sup>16</sup> **Ibid**, 2011, hal. 26.



Tema produk dan konsumen terdiri dari 3 item yaitu; Mutu produk, penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan penghargaan), *customer satisfaction* (upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen).

#### 4. *Evironmeent* (Lingkungan Hidup)

Banyak yang mengatakan bahwa CSR identik dengan pemberdayaan lingkungan hidup tanpa memperdulikan situasi sosialnya atau masih banyak persepsi lainnya yang sifatnya tidak menyeluruh, setengah-setengah memahaminya, bahkan terlampau dangkal dalam mencerna CSR itu sendiri

Namun, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 juli 2007 menandai badak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan CSR dan lingkungan.

Setelah memahami CSR secara utuh, baru tahap pelaksanaan CSR bisa dimulai. Dibutuhkan upaya dan strategi ekstra agar implementasi CSR sanggup bahkan berjalan sesuai dengan ide dan konsep dasarnya.

**Strategi eksta tersebut sebaiknya meliputi empat agenda utama, yakni: pedoman (*guidelines*) dan tata etika (*codes of conduct*), sistem dan kebijakan manajemen korporatat, strategi kepemilikan korporat dalam CSR, terakhir komitmen dan kemitraan di antara stakeholder.<sup>17</sup>**

Ketiga unsur ini harus membentuk kolaborasi yang terbuka dan saling memberikan nilai tambah sehingga ketika strategi kolaborasi kemitraan ini di bawa ke tataran teknis akan menghasilkan kreasi CSR yang komprehensif serta berhubungan di semua kalangan.

## 2.4 Tata Kelola peusahaan (Good Corporate Governance)

---

<sup>17</sup> Dwi Kartini, **Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 47.

Berbicara tentang corporate governance tidak dapat dipisahkan dengan konsep dan sistem korporasi itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah pengertian *corporate* dan *corporate governance* (Tjager, et al, 2003):

*A corporation is a mechanism established to allow different parties to contribute capital, expertise, and labor, for their mutual benefit.* (Hunger & Loheelen). (Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian, dan tenaga, demi manfaat bersama).

*Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditu, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

**Istilah “Corporate Governance” pertama diperkenalkan Cadbury committee tahun 1992 dalam laporan yang dikenal Cadbury Report. Laporan ini sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik Corporate Governance di seluruh dunia.<sup>18</sup>**

Tata Kelola Perusahaan dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (*Indonesian Institute of Corporate Governance/IICG*, 2011).

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mendefinisikan GCG.”*The structure through which shareholders, directors, managers, set*

---

<sup>18</sup> Sedarmayanti, “**Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) & Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)**”, Bagian ketiga: Mandar Maju, Bandung, 2018. Hal.53

*of the board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*

Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI).

“GCG didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2011)”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance*, untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan *Good Corporate Governance* adalah sistem, proses, konsep dan seperangkat peraturan mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan berdasarkan pada kerangka peraturan. Sistem dari *good corporate governance* juga memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan juga menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat.

Mekanisme CG juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain:

- a) Mengurangi *agency cost* yang merupakan biaya yang harus ditanggung shareholder karena penyalagunaan wewenang sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang di pinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c) Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Dari kelima bidang utama tersebut, dituangkan dalam beberapa bentuk dari berbagai prinsip berbagai sumber. Menurut OECD menguraikan empat prinsip Good Corporate Governance dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi masing-masing negara.

1. Fairness (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

2. Disclosure dan Transparency (trasparansi)

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan.

3. Accountability (akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

#### 4. Responsibility (Responsibilitas)

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Goo Corporate Governance diutarakan bahwa prinsip GCG meliputi:

- 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.**
- 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.**
- 3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.**
- 4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.**
- 5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.<sup>19</sup>**

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri manufaktur, perusahaan wajib melaksanakan usahanya dengan berpedoman pada prinsip GCG. Berbagai urain mengenai prinsip-prinsip GCG menurut sumber tersebut, terlihat sekali bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tidak hanya

---

<sup>19</sup> Sedarmayanti, **Op.Cit.**, hal. 57

mengedepankan bagaimana maksud dan tujuan perusahaan itu dapat direalisasikan. Namun dibalik itu semua ada etika dan norma yang harus diperhatikan, sehingga dewan komisaris dan direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap mengutamakan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, baik shareholder maupun stakeholder. Supaya prinsip-prinsip GCG tersebut dapat terlaksanakan dengan baik maka diperlukan manajemen perusahaan atau struktur *corporate governance*. Dalam GCG terdapat indikator antara lain komite audit, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial.

#### 2.4.1 Komite Audit

**Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris serta menguasai dan memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan.<sup>20</sup>**

Dalam menjalankan fungsinya komite audit harus melakukan pertemuan dengan manajemen perusahaan guna memantau proses pembuatan laporan keuangan perusahaan dengan mengadakan rapat yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Serta rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Keberadaan Komite Audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance* dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Aji,

---

<sup>20</sup> Ani Kurnia Ningsi lestari, “Pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kualitas Laba Akuntansi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi, Vol.7, Nomor 1, 2017, hal.22.

2012). Dalam surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 juga mengatur mengenai struktur dari komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Selain itu, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 menyatakan bahwa komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Independensi ini diperlukan agar laporan keuangan perusahaan dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Komite audit juga harus memiliki kompetensi khususnya dalam bidang akuntansi dan keuangan agar mudah mendeteksi adanya manipulasi dalam laporan keuangan perusahaan serta mampu menemukan salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan.

#### **2.4.2 Ukuran Dewan Komisaris**

Pedoman umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG dijelaskan bahwa kepengurusan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris, sehingga dewan komisaris bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi tugas-tugas manajemen, memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG serta tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Anggota dewan komisaris dan dewan direksi diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka waktu. Oleh karena itu, dewan komisaris dan nilai-nilai perusahaan. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Supaya pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik. Dengan proses monitoring yang baik, maka diharapkan pengungkapan CSR yang terdiri dari kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk, dan lingkungan hidup akan semakin luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat dikurangi.

#### **4.2.3 Komisaris Independen**

Dewan komisaris merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* dalam perusahaan khususnya dewan komisaris independen. Komisaris independen



merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemilik perusahaan, tidak memiliki saham perusahaan dan juga berasal dari pihak luar emiten sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012.

#### **4.2.4 Kepemilikan Manajerial**

Perbedaan kepentingan tersebut merupakan penyebab terjadinya konflik keagenan dalam teori agensi. Dimana antara prinsipal dan agen masing-masing berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham menuntun *return* yang tinggi dari laba yang dihasilkan dan manajemen mengharapkan bonus dari tingginya laba perusahaan. Konflik keagenan merupakan penyebab terjadi perilaku manajemen laba yang dapat dilakukan manajemen untuk memnuhi utilitasnya. Salah satu cara mencegah terjadi manajemen laba adalah dengan pemberian kepemilikan saham perusahaan kepada manajemen.

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh manajemen yang secara aktif ikut mengambil keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Muid, 2009).

Dengan demikian dilakukan lah penyelenggaraan CGPI yaitu melakukan pengembangan metodologi dan cakupan responden agar hasil riset dapat lebih representatif memberikan gambaran penerapan GCG di Indonesia. Dengan metodologi dan cakupan yang representatif, pemberian penghargaan dan *brenchmark* akan lebih terpercayadandapatmemberikandampak edukasiyangluasbagikalangandunia usaha diIndonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggabungkan berbagai mekanisme dan struktur CG baik dari para peneliti sebelumnya, prinsip-prinsip CG dan dari peraturan-peraturan pemerintah serta BAPEPAM untuk melengkapi proksi yang bisa digunakan untuk mengukur CG pada perusahaan publik di Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan menilai kesesuaian antara menggunakan Indeks Pengungkapan *Corporate Government* (IPCG) dengan hasil penilaian yang dilakukan dengan ILCG dalam menilai implementasi CG. Sedangkan tujuan penyusunan indeks CG adalah untuk mengetahui perbedaan penilaian dengan menggunakan indeks pengungkapan CG dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh IICG dalam menilai implementasi CG suatu perusahaan.

Investor, calon investor, dan para pemangku kepentingan lainnya apabila ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, bisa melihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan kemudian melakukan analisis terhadap laporan keuangan tersebut. Sedangkan jika mereka ingin mengetahui bagaimana implementasi *corporate governance* maka belum ada proksi komprehensif yang dapat mewakili implementasi CG. Oleh karena itu, harus dilakukan riset yang mendalam, masuk ke perusahaan untuk menilai implementasi CG. Di sisi lain investor, calon investor, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan sumber daya karena mereka harus melakukan riset mendalam dengan masuk ke suatu perusahaan. Oleh karena itu pembentukan indeks *corporate governance* ini semoga bermanfaat membantu *stakeholders* dalam menilai implementasi CG suatu perusahaan dengan melihat laporan tahunannya.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan Good Corporate Governance (GCG) banyak dilakukan oleh peneliti baik dari luar maupun dalam negeri. Sebagian besar peneliti berfokus pada faktor-faktor pengungkapan CSR dan mekanisme GCG oleh perusahaan. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

	Judul Penelitian	Peneliti	Metode Penelitian	Jenis Data	Temuan Penelitian
	PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING	Illa Fauziah	KORPORATIF	Kuantitatif linier	Pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba

ARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KUALITAS LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009-2012)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silviana Isyanto</li> <li>• Dewi Ratnaning-sih</li> </ul>	rate Social Responsibility (X)	si Berganda	nifikan, negatif	
ARUH	Ani	Jumla	R	X1=	

<p>MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LABA AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA</p>				<p>X2=</p>
--	--	--	--	------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

X5=



--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

## **2.6 Kerangka Teori**

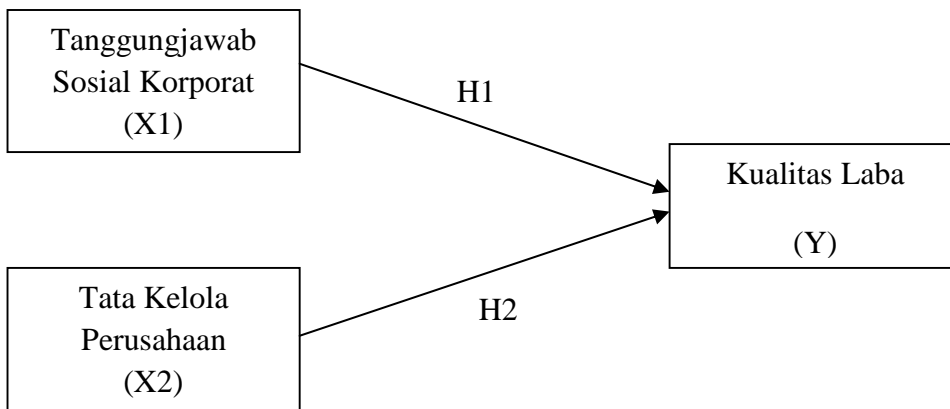
penelitian ini dilakukan untuk gambaran tentang pengaruh CSR dan GCG terhadap kinerja laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat kegiatan perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat sekitar. Eksistensinya dapat diterima sebagai anggota masyarakat, sebaliknya eksistensinya pun juga dapat terancam bila perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut atau bahkan merugikan anggota

komunitas tersebut. Kiroyan (2006, dalam Novita dan Djakman (2008) menyatakan bahwa Dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitisasi social dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Organisasi dapat menetapkan legitisasi mereka dengan memadukan antara kinerja perusahaan dengan ekspektasi atau persepsi publik.

Sedangkan dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah-masalah keagenan (*agency problem*). Masalah-masalah keagenan tersebut timbul karena ada konflik atau perbedaan kepentingan antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan modal) dan *agent* (manajer perusahaan). Konsep GCG timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan. Manajemen yang menerapkan GCG akan lebih concern dalam mengungkapkan secara luas hasil kinerja perusahaan yang manejemannya dikategorikan Bad Corporate Governance. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengungkapan GCG dilalam kualitas laba sebagai kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba perusahaan dan membantu memprediksi laba mendatang. Untuk mendorong laba GCG dapat membantu tibulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan principal perusahaan jangka panjang.

Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis**

## **2.7 Pengembangan Hipotesis**

### **2.7.1 Pengungkapan CSR dengan Kualitas Laba Perusahaan**

Dalam teori legitimasi pengungkapan CSR yang bersifat tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan akan dinilai baik bagi stakeholder dan dapat menaikkan kualitas laba. Carroll (1979) dalam Kim *et. al.* (2012) mendefinisikan CSR sebagai suatu tanggungjawab sosial atas usaha yang meliputi ekonomi, legal, etika, dan *discretionary* yang diharapkan masyarakat atas suatu organisasi pada saat itu. Masyarakat memiliki ekspektasi yang besar terhadap perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang transparan terkait bisnis yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh manajemen memiliki dampak yang positif dan negatif terhadap kualitas laba. Dampak negatif dari pengungkapan CSR adalah manajemen dapat menggunakan pengungkapan CSR untuk menutupi perilaku manajemen laba yang dapat menurunkan kualitas laba. Di lain pihak, dengan pengungkapan CSR maka manajemen dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan *stakeholders* untuk memberikan *image* yang positif terkait dengan kondisi perusahaan dan dapat menaikkan kualitas laba.

Perusahaan yang berkontribusi terhadap CSR pengungkapannya lebih informatif sehingga CSR dapat meningkatkan transparansi dan dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan manajemen laba oleh karenanya perusahaan yang berkontribusi terhadap CSR lebih kecil melakukan praktik manajemen laba. Dengan adanya CSR manajemen laba akan berkurang dan meningkatkan kualitas laba perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan

### **2.7.2 Pengaruh Tata kelola perusahaan (GCG) dengan Kualitas Laba Perusahaan.**

Manfaat dari penerapan Good Corporate Governance dapat diketahui dari mekanisme good corporate governance dengan menggunakan ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Penerapan Good Corporate Governance yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dengan kata lain dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan.

Berdasarkan teori agensi karakteristik komite audit, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen (agen) agar tidak merugikan pemilik perusahaan (prinsipal) adalah ukuran komite audit. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi monitoring pada komite audit terhadap pihak manajemen (Putri, 2011).

Pierce dan Zahra (1992) dalam Elianna (2015) mengatakan bahwa efektivitas komite audit akan meningkat ketika ukuran komite audit bertambah atau dalam jumlah yang semakin besar, karena komite audit akan memiliki sumber daya yang lebih besar pula untuk menghadapi isu atau masalah-masalah perusahaan. Jumlah anggota komite audit, dewan komisaris, dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial menentukan kinerja yang akan dihasilkan oleh pihak manajemen sebagai pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Penerapan prinsip GCG ini adalah untuk menghasilkan kualitas laba perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Tata Kelola Perusahaan (GCG) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laba Perusahaan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian analisi kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data *numerical* atau angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pada penelitian *interensial* atau dalam rangka pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Tanggungjawab Sosial Korporat (*Corporate Social Responsibility*), Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), dan variabel dependen adalah Kualitas Laba.

#### **3.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.

Populasi target adalah sebahagian dari anggota pop[ulasi yang memenuhi karakteristik tertentu untuk diriset. Dengan kata lain, populasi target adalah populasi spesifik yang relevan dengan tujuan atau masalah penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 42 industri. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan

menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi dengan kriteria tertentu, yaitu:

1. Aneka industri yang terdaftar di BEI untuk tahun 2015-2017.
2. Menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) yang lengkap terutama corporate social responsibility, good corporate governance, profil komite audit, dewan komisaris dan struktur kepemilikan serta laporan keuangan (*financial statement*) pada tahun 2015-2017.
3. Laporan keuangan disajikan semua dalam bentuk mata uang rupiah, dan memiliki akhir tahun fiskal 31 Desember.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan di atas, maka sampel penelitian sebanyak 18 sampel.

**Tabel 3.1**  
**Sampel Penelitian**

No.	Nama Bank	Kode Saham
	Astra International Tbk	
	Astra Auto Part Tbk	
	Sepatu Bata Tbk	
	Primarindo Asia Infrastructure Tbk <i>d.h Bintang Kharisma</i>	
	Gajah Tunggal Tbk	
	Panasia Indo Resources Tbk <i>d.h Panasia Indosyntec Tbk</i>	
	Indomobil Sukses International Tbk	



Indospring Tbk	
Jembo Cable Company Tbk	
KMI Wire and Cable Tbk	
Kabelindo Murni Tbk	I
Grand KartechTbk	I
Nippres Tbk	
Ricky Putra Globalindo Tbk	
Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	
SelamatSempurna Tbk	I
Nusantara Inti Corpora Tbk	
Voksel Electric Tbk	

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa item Corporate Sosial Responsibility dan Good Corporate Governance yang terdapat di Laporan Tahunan perusahaan manufaktur aneka industri di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (website BEI).

### 3.4 Variabel Penelitian

Menurut Sekarung: “Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai”. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel

independen. Menurut sekaran, “Variabel Dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi”. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kinerja laba. Sedangkan variabel independen menurut Sekaran adalah: “Variabel yang mempengaruhi variabel dependen, entah secara positif atau negatif”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility dan good corporate governance.

### **3.4.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laba. Kualitas laba diukur dengan menggunakan proxy manajemen laba. Manajemen laba merupakan bentuk perilaku *agent* untuk memenuhi tujuan dan kepentingannya. Semakin rendah aktivitas manajemen laba, maka semakin tinggi kualitas laba. Pengukuran manajemen laba mengadopsi model Jones (1991). Jones mengembangkan model untuk *discretionary accruals* dengan rumus sebagai berikut:

$$DA_{it} = (TA_{it} - TA_{it-1})/A_{it-1}$$

Keterangan:

$DA_{it}$  : Discretionary accruals perusahaan i pada periode ke t

$TA_{it}$  : Total accruals perusahaan i pada periode ke t

$TA_{it-1}$  : Total accruals perusahaan i pada periode ke t-1

$A_{it-1}$  : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

### **3.4.2 Variabel Independen**

- a. Corporate Sosial Responsibility

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*. Pengukuran yang biasa dilakukan mengetahui kelengkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya adalah melakukan *Checklist*. *Checklist* merupakan kumpulan item pengungkapan yang diminta oleh suatu peraturan dan/atau standar (SAK) pengungkapan tersebut. Pengukuran pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu, dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, Setiap item yang diungkapkan di *annual report* di beri nilai 1 dan 0 jika sebaliknya. Di penelitian ini CSR diukur menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI). Jumlah item pengungkapan CSR menurut GRI adalah 32 item yang terdiri dari: lingkungan (7 item), praktik tenaga kerja (14 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (3 item).. Perhitungan nilai CSR didapat dengan cara :

$$\text{Nilai CSR} = \frac{n}{32}$$

b. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan mekanisme dan struktur pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan akuntabilitas perusahaan guna mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan (stakeholder), tidak hanya pemegang saham (shareholder). Variabel Tata Kelola Perusahaan (GCG) diukur dengan menggunakan Indeks Pengungkapan CG sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Indeks Pengungkapan Corporate Governance dan Penskorannya**

No.	Variabel	Range	Skor
1	Mengungkapkan visi (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka	1 0

		n	
2	Mengungkapkan misi (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
3	Mengungkapkan tentang pedoman perilaku (KNKG, 2006), dan atau etika perusahaan*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
4	Mengungkapkan budaya/nilai-nilai perusahaan*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
5	Mengungkapkan sasaran usaha (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
6	Mengungkapkan strategi perusahaan (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
7	Ketepatan/waktu penyajian laporan tahunan (KNKG, 2006)	0 – 1 bulan >1-3 bulan >3 – 6 bulan >6- 9 bulan >9 bulan	5 4 3 2 1
8	Jumlah komisaris independen (shah et al., 2009)	0%-----20% 21%----- 40% 41%-----60% 61%-----80% 81% <i>andabove</i>	1 2 3 4 5
9	Jumlah komite audit independen (Shah et al., 2009)	0%-----20% 21%----- 40% 41%-----60% 61%-----80% 81% <i>andabove</i>	1 2 3 4 5
10	Konsentrasi kepemilikan (Shah et al., 2009)	0%-----20% 21%----- 40% 41%-----60% 61%-----80% 81% <i>andabove</i>	5 4 3 2 1
11	Prosentase saham yang dipegang oleh anggota dewan direktur (shah et al., 2009)	0%-----20% 21%----- 40% 41%-----60% 61%-----80% 81% <i>andabove</i>	5 4 3 2 1
12	Kepemilikan institusional (Cornett et al., 2006)	%-----20% 21%----- 40%	1 2

		41%-----60%	3
		61%-----80%	4
		81% <i>and above</i>	5
13	Lama jabatan presiden komisaris (Cornett et al., 2006)	0-5 tahun	1
		>5 – 10 tahun	2
		>10 -15 tahun	3
		>15-20 tahun	4
		> 20 tahun	5
14	Mengungkapkan tugas dan tanggungjawab dewan komisaris (KNKG, 2006)	Mengungkapkan	1
		Tidakmengungkapka n	0
15	Mengungkapkan tugas dan tanggungjawab dewan direksi (KNKG, 2006)	Mengungkapkan	1
		Tidakmengungkapka n	0
16	Mengungkapkan tugas dan tanggungjawab komite audit (KNKG, 2006)	Mengungkapkan	1
		Tidakmengungkapka n	0
17	Mengungkapkan keahlian/pengalaman kerja/latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi (KNKG, 2006)	Mengungkapkan	1
		Tidakmengungkapka n	0
18	Keahlian dewan komisaris pada bidang akuntansi dan keuangan*	Setiap anggota yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan bernilai 1	
19	Jumlah dewan komisaris (Cornett et al., 2006)	1-3 orang	5
		4 orang	4
		5 orang	3
		6 orang	2
		Lebih dari 6 orang	1
20	Direktur utama atau anggota dewan direktur merangkap sebagai komisaris utama ( <i>CEO/chair duality</i> ). (Cornett et al., 2006)	Jika merangkap	0
		Tidak merangkap	1
21	Mengungkapkan keberadaan sekretaris perusahaan*	Mengungkapkan	1
		Tidak mengungkapkan	0
22	Mengungkapkan tugas dan tanggungjawab sektretaris perusahaan (KNKG, 2006)	Mengungkapkan	1
		Tidak mengungkapkan	0
23	Pengungkapan tentang rapat dewan komisaris (KNKG, 2006)	Mengungkapkan	1
		Tidak mengungkapkan	0

24	Pengungkapan tentang rapat dewan direksi (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidak mengungkapkan	1 0
25	Pengungkapkan remunerasi dewan direksi dan dewan komisaris (KNKG, 2006)	Mengungkapkan secara rinci Mengungkapkan tidak rinci Tidak mengungkapkan	2 1 0
26	Pengungkapan tentang RUPS (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidak mengungkapkan	1 0
27	Pendapat auditor (Achjari et al., 2009)	pendapat wajar tanpa pengecualian, Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas Pendapat wajar dengan pengecualian, Pendapat tidak wajar Menolak memberi Pendapat	5 4 3 2 1
28	Mengungkapkan struktur organisasi perusahaan (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidak mengungkapkan	1 0
29	Mengungkapkan keberadaan komite remunerasi (Achjari et al., 2009)	Mengungkapkan Tidak mengungkapkan	1 0
30	Mengungkapkan keberadaan komite audit (Achjari et al., 2009)	Mengungkapkan Tidak mengungkapkan	1 0
31	Mengungkapkan keberadaan audit internal*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
32	Mengungkapkan keberadaan <i>legal committee</i> (Achjari et al., 2009)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
33	Keberadaan <i>compliance committee</i> (Achjari et al., 2009)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
34	Mengungkapkan keberadaan <i>mitigation committee</i> (Achjari et al., 2009)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
35	Mengungkapkan keberadaan komite asuransi/ manajemen risiko*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka	1 0

		n	
36	Mendeskripsikan kondisi keuangan perusahaan (KNKG, 2006)*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
37	Besarnya <i>return of total assets</i> (ROA) (Achjari et al., 2009)*	Sampai dengan 10 % >10%-20% >20%-30% >30%-40% >40% Kalau Rugi (minus)	1 2 3 4 5 0
38	Mengungkapkan ikhtisar saham*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
39	Mengungkapkan ikhtisar keuangan*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
40	Mengungkapkan pertumbuhan laba*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
41	Mengungkapkan pembahasan dan analisa manajemen*	Diungkapkan secara Sangat luas Diungkapkan secara luas Diungkapkan secara kurang luas Tidak diungkapkan	3 2 1 0
42	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (misal peringkat kinerja lingkungan dan lain-lain (KNKG, 2006)	Perolehanperingk at kinerja lingkungan: Emas Hijau Biru Merah Hitam	5 4 3 2 1
43	Perolehan berbagai <i>awards</i> ( <i>penghargaan</i> ) tentang lingkungan, CG dan lain-lainnya (KNKG, 2006)	Setiap perolehan 1 penghargaan ( <i>awards</i> ) dalam tahun pengamatan memperoleh skor1	
44	Pengungkapan tentang CSR (KNKG, 2006)	Pengungkapan CSR dibagi dalam 5 indikator (GRI dalam	Setiap pengung- kapan

		Dahlia dan Siregar, 2008), yaitu: indikator ekonomi (9 <i>item</i> ), lingkungan (30 <i>item</i> ), tenaga kerja (14 <i>item</i> ), hak asasi manusia (9 <i>item</i> ), sosial (8 <i>item</i> ), dan produk (9 <i>item</i> ).	satu item diberi nilai 1
45	Mengungkapkan tentang <i>corporate action</i> , yang mencakup pengungkapan aspek-aspek non keuangan. (Achjari et al., 2009)	Format lengkap <i>corporate action</i> mencakup seluruh nilai yang berisi <i>company meeting</i> , perubahan status <i>listing</i> , <i>announcement</i> , <i>preferential offer</i> , <i>bonus</i> , <i>new listing</i> , <i>buy back</i> , <i>issuer name change</i> , <i>preference conversion</i> , <i>local code change</i> , <i>arrangement</i> , <i>security description change</i> , <i>international code change</i> , <i>sedol change subdivion</i> , <i>take over</i> dan sebagainya.	Setiap pengungkapan satu item <i>corporate action</i> mendapat nilai 1
46	Mengungkapkan penjualan dan pembelian saham oleh direksi*	Mengungkapkan Tidakmengungkapkan	1 0
47	Mengungkapkan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan*	Mengungkapkan Tidakmengungkapkan	1 0
48	Mengungkapkan tentang sistem penghargaan dan sanksi (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapkan	1 0
49	Mengungkapkan tentang efektifitas sistem pengendalian intern (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapkan	1 0
50	Konsistensi pemakaian metode akuntansi dari tahun ke tahun agar mudah diperbandingkan antar tahun (KNKG, 2006)	Konsisten Tidakkonsisten	1 0
51	Mengungkapkan perubahan kepemilikan (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapkan	1 0
52	Mengungkapkan sistem manajemen risiko (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapkan	1 0



53	Mengungkapkan tentang sistem pengawasan dan pengendalian internal (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
54	Mengungkapkan sistem dan pelaksanaan GCG (KNKG, 2006)	Diungkapkan secara Sangat luas Diungkapkan secara luas Diungkapkan secara kurang luas Tidak diungkapkan	3 2 1 0
55	Mengungkapkan kejadian/peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan (KNKG, 2006)	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
56	Mengungkapkan kebijakan-kebijakan perusahaan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan <i>stakeholder</i> (KNKG, 2006)	Diungkapkan secara luas Diungkapkan tidak luas Tidak diungkapkan	2 1 0
57	Mengungkapkan perkara penting*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
58	Mengungkapkan pengelolaan SDM*	Diungkapkan secara Sangat luas Diungkapkan secara luas Diungkapkan secara kurang luas Tidak diungkapkan	3 2 1 0
59	Mengungkapkan asuransi karyawan*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0
60	Mengungkapkan komitmen pada pelanggan*	Mengungkapkan Tidakmengungkapka n	1 0

\*Sumber berasal dari kebiasaan laporan tahunan pada perusahaan yang mendapat penghargaan GCG, dan *Annual Report Awards* (ARA).<sup>21</sup>

Dengan kategori nilai:  
 Skor 101-150 = Sangat Baik  
 Skor 76-100 = Baik  
 Skor 61-75 = Sedang

<sup>21</sup> Surifah, "Arranging the Index Of Corporate Governance", Jurnal Dinamika Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Vol.2, Nomor 1, 2011, hal.8-13.

Skor 41-60 = Buruk  
Skor 1-40 = Sangat Buruk

### **3.5 Metode Pengumpulan data**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumen, yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan dan dokumen-dokumen perusahaan baik dalam bentuk dokumen maupun peyunjuk-petunjuk guna mendapatkan data yang diperlukan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1 Analisi Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran menarik yang sangat penting bagi data dan sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel yang meliputi antara lain mean, median, maksimum, minimum, dan deviasi standar dan untuk mengetahui tingkat pengungkapan variabel-variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility, corporate governance* dan kinerja laba perusahaan.

#### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi dengan uji nilai selisih mutlak. Untuk menghasilkan nilai yang tepat terlebih dahulu

akan dilakukan pengujian asumsi klasik dalam menentukan ketepatan model. Uji asumsi klasik yang akan digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali **“Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak”**.<sup>22</sup> Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis grafik histogram dan normal probability plot, dan analisis statistik non parametrik *onesample kolmogorov-smirnov test*. Dalam uji ini menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05 yang berarti variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

### 3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%.

---

<sup>22</sup> Imam Ghozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25**, Edisin 9: Universitas Diponegoro, Semarang , 2018, hal 161.

### 3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali, **“Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas”**.<sup>23</sup> Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat grafik plot antara variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dasar analisisnya adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu dilakukan juga uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2006) dengan persamaan regresi :

$$U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$$

---

<sup>23</sup>Ibid, hal. 137

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute  $U_t$  (Abs $U_t$ ) dengan probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

#### 3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali “**Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode – t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya)**”.<sup>24</sup> Uji Durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantaravariabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah :  $H_0 =$  tidak ada autokorelasi ( $r = 0$ ), dan  $H_a =$  ada korelasi ( $r \neq 0$ ).

#### 3.6.3 Analisis Regresi

---

<sup>24</sup>Ibid, hal. 111

Menurut Ghozali, Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi memiliki tiga cara untuk menguji regresi dengan variabel moderating. Frucot and Shearon (1991) mengajukan model regresi yang agak berbeda untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen. Penelitian ini menggunakan nilai uji selisih mutlak dengan alasan yaitu:

1. Model ini mampu mengatasi multikolinearitas yang umumnya terjadi sangat tinggi apabila menggunakan uji interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen)
2. Model ini memasukkan variabel efek utama dalam analisis regresi, sedangkan uji residual hanya memasukkan efek interaksi saja. Menghilangkan efek-efek utama menyebabkan hasil koefisien interaksibias menuju arah signifikan sehingga menghilangkan arti dari efek interaksi.

Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan penelitian ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{CSRI} + \beta_2 \text{CG} + e$$

Keterangan :

Y = indeks skor kualitas laba

$\beta_0$  = konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = koefisien regresi

CSRI = *corporate social responsibility disclosure index*

CG = *corporate governance*

e = error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

### **3.6.4 Pengujian Hipotesis**

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji koefisien determinasi, uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), dan uji signifikansi simultan (uji statistik f).

#### **2.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (*goodness of fit test*)**

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan modal dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam *adjusted R square* ( $R^2$ )

#### **2.6.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (uji statistik t)**

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian adalah :

1. Ho diterima jika nilai probabilitas (sig t) < (0,05) dan p value < 0,05
2. Ho ditolak jika nilai probabilitas (sig t) > (0,05) dan p value > 0,05

